

Pengaruh Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Internal, dan Implementasi E-Procurement terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat

The Effect of Organizational Commitment, Internal Control Systems, and E-Procurement Implementation on Fraud Prevention in Goods and Services Procurement at the Regional Disaster Management Agency of West Java Province

Lenni Putri Telaumbanua^{1*}

Program Studi Akuntansi, Universitas Kristen Maranatha, Bandung, Indonesia

Yemima Marjorie Shammah Shaddai²

Program Studi Akuntansi, Universitas Kristen Maranatha, Bandung, Indonesia

*Korespondensi: lenniputri.telaumbanua@gmail.com

ABSTRAK

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan aktivitas yang rawan fraud, terutama pada instansi dengan karakteristik pengadaan darurat seperti BPBD Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh komitmen organisasi, sistem pengendalian internal, dan implementasi *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud*. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan verifikatif. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 25 pegawai yang terlibat langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa dengan teknik *sampling* jenuh (*sensus*). Analisis data dilakukan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial komitmen dan implementasi *e-procurement* tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*, sedangkan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Kontribusi penelitian ini adalah menegaskan pentingnya efektivitas sistem pengendalian internal sebagai faktor utama dalam pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah daerah. Implikasi praktisnya, BPBD perlu memperkuat audit internal dan optimalisasi *e-procurement*.

Kata kunci: komitmen organisasi; sistem pengendalian internal; *e-procurement*; pencegahan *fraud*; pengadaan barang dan jasa.

ABSTRACT

Fraud in government procurement remains a critical challenge, particularly in agencies with urgent and high-risk procurement processes such as the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of West Java Province. This study investigates the influence of organizational commitment, internal control systems, and e-procurement implementation on fraud prevention. A quantitative approach was applied using descriptive and verificative methods. Primary data were collected through questionnaires administered to 25 employees directly involved in procurement activities, selected through saturated sampling (census). Data analysis employed multiple linear regression with SPSS, including validity, reliability, classical assumption tests, t-tests, F-tests, and the coefficient of determination. The findings reveal that organizational



commitment and e-procurement implementation do not significantly affect fraud prevention, whereas internal control systems exert a positive and significant influence. Jointly, the three variables significantly explain fraud prevention. This study underscores the pivotal role of internal control systems in mitigating fraud risks within government procurement. Practically, the results suggest that BPBD should prioritize strengthening internal audits and enhancing the utilization of e-procurement.

Keywords: *organizational commitment; internal control system; e-procurement; fraud prevention; procurement of goods and services.*

PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu aktivitas yang memiliki risiko tinggi terhadap terjadinya kecurangan (*fraud*). Pengadaan publik di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan persaingan sehat. Namun dalam praktiknya, sektor pengadaan masih menjadi area yang paling rawan terjadinya penyimpangan.

Fenomena terbaru yang menjadi sorotan publik adalah kasus dugaan penyimpangan dalam pengadaan *Chromebook* pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang ramai diberitakan media. Kasus tersebut menunjukkan bahwa pengadaan barang berbasis teknologi sekalipun tetap memiliki potensi *fraud* apabila sistem pengendalian dan tata kelola tidak berjalan optimal. Fenomena ini memperkuat pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa mayoritas kasus korupsi di daerah berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. LKPP melaporkan potensi pengadaan pemerintah tahun 2024 sekitar Rp1.250 triliun, sementara transaksi melalui Katalog Elektronik telah mencapai Rp253,1 triliun (LKPP, 2024). Besarnya nilai tersebut perlu dibaca bersama dengan temuan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 KPK: 49% responden menilai pemilihan pemenang vendor semakin banyak diatur, 56% menilai kualitas barang tidak sesuai dengan harga, 38% menilai hasil pengadaan tidak memberikan manfaat, dan 46% menemukan gratifikasi dari vendor kepada penyelenggara negara dalam proses pengadaan (KPK, 2025). *Indonesia Corruption Watch* juga mencatat 1.586 kasus korupsi terkait pengadaan barang/jasa sepanjang 2016-2022 dengan kerugian negara sekitar Rp19,5 triliun (ICW, 2024). Data tersebut menunjukkan bahwa risiko *fraud* dalam pengadaan bukan sekadar isu insidental, tetapi merupakan persoalan tata kelola yang membutuhkan kombinasi pengendalian, integritas, dan mekanisme digital yang efektif.

Pada level global, ACFE (2024) menganalisis 1.921 kasus *occupational fraud* dari 138 negara dan wilayah dengan total kerugian lebih dari US\$3,1 miliar. ACFE menekankan bahwa lemahnya atau dikesampingkannya pengendalian internal merupakan salah satu faktor penting yang membuka kesempatan terjadinya *fraud*. Dalam kerangka *Fraud Triangle*, kesempatan (*opportunity*) menjadi komponen yang paling langsung dapat dipengaruhi organisasi melalui desain pengendalian, segregasi tugas, otorisasi, dokumentasi, *monitoring*, dan jejak audit yang memadai.

Digitalisasi pengadaan melalui *e-procurement* secara konseptual mempersempit kesempatan *fraud* karena proses menjadi lebih terdokumentasi, transparan, dapat ditelusuri, dan mengurangi interaksi informal antara pihak pengadaan dan penyedia. Namun, teknologi tidak otomatis menghilangkan *fraud*. Jiménez et al. (2022), menggunakan data 8.373 perusahaan di 72 negara, menemukan bahwa *e-procurement* menurunkan korupsi perusahaan dalam memperoleh kontrak publik, tetapi efektivitasnya bergantung pada kualitas institusi tata kelola dan dukungan supranasional. Dalam konteks Indonesia, Sa'adah (2020) juga menunjukkan manfaat *e-procurement* bagi pengurangan *fraud*, namun menekankan pentingnya kualitas pejabat pengadaan, regulasi, pengawasan, dan dukungan sistem.

Leatemia dan Febryanti (2020) menemukan bahwa pengendalian internal dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan pada rumah sakit pemerintah. Wardani et al. (2021), Dewi dan Sari (2022), Khairunnah dan Nadirsyah (2022), serta Akbar et al. (2019) menunjukkan peran positif *e-procurement* dan/atau pengendalian internal. Sebaliknya, Wibowo dan Hardaningsih (2023) menemukan bahwa komitmen organisasi dan pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, sedangkan integritas justru berpengaruh positif. Syalwa et al. (2023) pada Dinas PUPR Kota Palembang juga menunjukkan bahwa ketiga variabel secara simultan relevan, tetapi pengaruh parsialnya tidak sepenuhnya konsisten. Safitri et al. (2024) bahkan menunjukkan bahwa hanya sebagian tahapan *e-procurement* yang berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Keragaman temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan sistem formal dan teknologi perlu dianalisis bersama dengan konteks organisasi tempat sistem tersebut dijalankan. Sementara itu, penelitian Wardhani et al. (2021) menunjukkan bahwa implementasi *e-procurement* mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya *fraud*. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa masih perlu dikaji kembali pada instansi pemerintah lainnya dengan karakteristik organisasi yang berbeda.

Perbedaan temuan tersebut menimbulkan *research gap* yang perlu dikaji kembali pada instansi pemerintah daerah lain dengan karakteristik berbeda. Penelitian ini memperluas bukti tersebut pada BPBD Provinsi Jawa Barat karena kebutuhan pengadaan dapat muncul dalam situasi yang menuntut kecepatan respons, sehingga efektivitas pengendalian, disiplin prosedur, dan keterlacakan transaksi menjadi penting secara bersamaan. Berbeda dari studi yang hanya menekankan satu mekanisme, penelitian ini menguji secara simultan faktor perilaku (komitmen organisasi), mekanisme tata kelola (sistem pengendalian internal), dan mekanisme digital (*e-procurement*). Dengan demikian, penelitian bertujuan menganalisis pengaruh komitmen organisasi, sistem pengendalian internal, dan implementasi *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa pada BPBD Provinsi Jawa Barat.

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Landasan Teori

Fraud dan Fraud Triangle

Fraud atau kecurangan merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara yang tidak sah dan merugikan pihak lain. Dalam konteks pengadaan publik, bentuknya dapat mencakup pengaturan tender, *mark-up*, kolusi, konflik kepentingan, manipulasi dokumen, maupun pengadaan fiktif. *Fraud Triangle* menjelaskan *fraud* melalui tiga kondisi: *pressure*, *opportunity*, dan *rationalization* (Cressey, 1953). Bagi organisasi publik, komponen *opportunity* sangat relevan karena dapat dipersempit melalui pengendalian internal, keterbukaan proses, segregasi tugas, dokumentasi, dan *monitoring*. ACFE (2024) juga menegaskan pentingnya *anti-fraud controls* dalam menurunkan peluang serta meningkatkan persepsi bahwa penyimpangan dapat terdeteksi.

Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi mencerminkan keterikatan pegawai pada tujuan dan kepentingan organisasi serta kemauan untuk mempertahankan keanggotaannya (Robbins & Judge, 2015). Dalam pencegahan *fraud*, komitmen diperkirakan bekerja melalui internalisasi tujuan organisasi, kepatuhan terhadap aturan, dan kesediaan menjaga kepentingan instansi di atas kepentingan pribadi. Sejumlah studi menemukan hubungan positif antara komitmen dan pencegahan *fraud* (Leatemia & Febryanti, 2020; Salim et al., 2016), meskipun bukti lain menunjukkan pengaruh tersebut tidak selalu signifikan ketika mekanisme institusional atau

karakteristik individual lain lebih dominan (Wibowo & Hardaningsih, 2023; Syalwa et al., 2023).

Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal (SPI) adalah proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atas efektivitas operasi, keandalan pelaporan, pengamanan aset, dan kepatuhan. Kerangka COSO (2013) mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta monitoring; pada sektor pemerintahan Indonesia, prinsip pengendalian intern juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Dalam perspektif *Fraud Triangle*, SPI terutama menutup *opportunity* melalui otorisasi, pemisahan tugas, verifikasi, supervisi, dan tindak lanjut. Bukti empiris umumnya mendukung peran tersebut (Yuniarti, 2017; Taufik, 2019; Wardani et al., 2021; Dewi & Sari, 2022), walaupun hasil Wibowo dan Hardaningsih (2023) memperlihatkan bahwa efektivitas empirisnya dapat berbeda antar-konteks.

E-Procurement

E-procurement adalah penggunaan sistem elektronik dalam tahapan pengadaan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan keterlacakan. Implementasinya mencakup antara lain *e-tendering*, *e-purchasing*, dan mekanisme transaksi elektronik lainnya sesuai regulasi pengadaan pemerintah. *Digital record*, standardisasi alur, dan *audit trail* dapat mengurangi asimetri informasi dan membatasi interaksi informal yang berpotensi menimbulkan kolusi. Berbagai studi Indonesia mendukung kontribusi *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* (Artantri et al., 2016; Wardani et al., 2021; Khairunnah & Nadirsyah, 2022; Yusni, 2022). Namun, Septiawan (2018), Sa'adah (2020), Jiménez et al. (2022), dan Safitri et al. (2024) menunjukkan bahwa manfaat teknologi bergantung pada kapasitas pengguna, kualitas tata kelola, tahapan implementasi, serta integrasi dengan pengawasan.

Pencegahan *Fraud* dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Pencegahan *fraud* merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan dalam organisasi. Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, pencegahan *fraud* dapat dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian internal yang efektif, peningkatan integritas pegawai, serta penggunaan sistem pengadaan berbasis elektronik. Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE 2022), pencegahan *fraud* dapat dilakukan melalui beberapa langkah, antara lain: meningkatkan sistem pengendalian internal, meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan, meningkatkan pengawasan dan audit internal, dan membangun budaya organisasi yang berintegritas.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Pencegahan *Fraud*

Pegawai yang mengidentifikasi diri dengan tujuan organisasi memiliki insentif normatif lebih kuat untuk menjaga kepentingan instansi, mematuhi prosedur, dan menghindari tindakan yang merusak organisasi. Mekanisme ini seharusnya memperkuat budaya kepatuhan dan mengurangi toleransi terhadap *fraud*. Dukungan empiris diberikan oleh Leatemia dan Febryanti (2020) serta Salim et al. (2016), meskipun Wibowo dan Hardaningsih (2023) menunjukkan bahwa komitmen dapat menjadi tidak signifikan ketika faktor institusional atau integritas lebih menentukan. Dalam konteks BPBD, komitmen diharapkan mendorong konsistensi kepatuhan bahkan ketika proses pengadaan menuntut respons cepat.

H1: Komitmen organisasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud*

SPI membatasi *opportunity* melalui otorisasi, pemisahan fungsi, verifikasi, dokumentasi, penilaian risiko, dan *monitoring*. Semakin efektif pengendalian, semakin kecil ruang untuk melakukan atau menyembunyikan penyimpangan. Hubungan ini konsisten dengan *Fraud Triangle* dan didukung oleh Yuniarti (2017), Akbar et al. (2019), Taufik (2019), Wardani et al. (2021), serta Dewi dan Sari (2022). Pada BPBD, mekanisme tersebut penting karena kebutuhan kecepatan pengadaan tidak boleh mengurangi akuntabilitas dan keterlacakan keputusan.

H2: Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat.

Pengaruh Implementasi E-Procurement terhadap Pencegahan *Fraud*

E-procurement dapat menekan *fraud* dengan memperluas transparansi, membakukan tahapan, mengurangi kontak informal, dan menghasilkan audit trail. Penelitian Artantri et al. (2016), Wardani et al. (2021), Khairunnah dan Nadirsyah (2022), serta Yusni (2022) mendukung hubungan positif tersebut. Namun, manfaat *e-procurement* dapat melemah apabila implementasi hanya bersifat administratif atau tidak terintegrasi dengan pengawasan, kompetensi pengguna, dan *governance* yang memadai (Sa'adah, 2020; Jiménez et al., 2022; Safitri et al., 2024). Dalam penelitian ini, semakin efektif implementasi *e-procurement* diharapkan semakin kuat pencegahan *fraud*.

H3: Implementasi *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat.

Pengaruh Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Internal, dan Implementasi E-Procurement terhadap Pencegahan *Fraud*

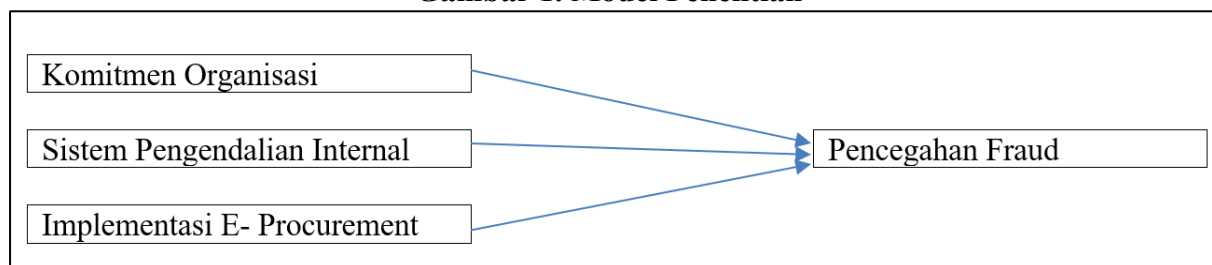
Pencegahan *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa dipengaruhi oleh faktor organisasi dan sistem pengendalian yang diterapkan secara bersama-sama. Komitmen organisasi, sistem pengendalian internal, dan implementasi *e-procurement* diduga memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta meminimalkan peluang terjadinya kecurangan.

H4: Komitmen organisasi, sistem pengendalian internal, dan implementasi *e-procurement* secara simultan berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada BPBD Provinsi Jawa Barat.

Kerangka Pemikiran

Penelitian ini difokuskan pada upaya penguatan pencegahan *fraud* melalui aspek sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Gambar 1. Model Penelitian



Sumber: Peneliti, 2026

METODE PENELITIAN

Jenis, Objek, Populasi, dan Sampel

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan verifikatif untuk menguji hubungan antara variabel komitmen organisasi, sistem pengendalian internal,

dan implementasi *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa.

Objek dalam penelitian ini adalah komitmen organisasi, sistem pengendalian internal, implementasi *e-procurement*, dan pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat.

Jumlah pegawai BPBD Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan adalah 165 orang, tetapi populasi target penelitian dibatasi pada pegawai yang terlibat langsung dalam proses pengadaan serta memahami pengendalian internal dan penggunaan *e-procurement*. Berdasarkan kriteria tersebut terdapat 25 pegawai yang memenuhi definisi populasi target. Seluruh 25 pegawai tersebut dijadikan responden, sehingga teknik yang digunakan adalah sampling jenuh (sensus) atas populasi target: 4 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), 1 Bendahara, 4 Bendahara Pengeluaran Pembantu, 6 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), 1 Verifikator, 4 Pejabat Pengadaan (PP), 3 Pengurus Barang Milik Daerah (BMD), dan 1 PPK SKPD

Pengumpulan dan Pengukuran Data

Data primer dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala Likert lima poin, dari 1 = sangat tidak setuju sampai 5 = sangat setuju. Instrumen terdiri atas 3 item komitmen organisasi, 5 item sistem pengendalian internal, 4 item implementasi *e-procurement*, dan 4 item pencegahan *fraud*. Data sekunder digunakan untuk mendukung argumentasi melalui regulasi, laporan institusional, dan studi ilmiah yang relevan.

Tabel 1. Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Item Pertanyaan	Skala
Komitmen Organisasi (X1)	Tingkat keterikatan pegawai terhadap organisasi yang ditunjukkan melalui loyalitas, keterlibatan, dan keinginan untuk tetap menjadi bagian organisasi	1. Loyalitas 2. Keterlibatan 3. Keinginan bertahan	1. Saya merasa bangga menjadi bagian organisasi 2. Saya berusaha memberikan kontribusi terbaik 3. Saya ingin tetap bekerja di instansi ini	Likert
Sistem Pengendalian Internal (X2)	Proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai dalam mencapai tujuan organisasi terkait efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan	1. Lingkungan pengendalian 2. Penilaian risiko 3. Aktivitas pengendalian 4. Informasi & komunikasi 5. Monitoring	1. Terdapat aturan kerja yang jelas 2. Risiko pengadaan diidentifikasi dengan baik 3. Proses pengadaan diawasi dengan ketat 4. Informasi disampaikan secara transparan 5. Evaluasi dilakukan secara berkala	Likert
Implementasi E-Procurement (X3)	Penerapan sistem elektronik dalam proses pengadaan barang dan jasa untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi	1. Transparansi 2. Efisiensi 3. Akuntabilitas 4. Penggunaan sistem	1. Pengadaan dilakukan secara terbuka 2. Proses menjadi lebih cepat 3. Setiap transaksi dapat dipertanggungjawabkan 4. Sistem elektronik digunakan secara optimal	Likert
Pencegahan Fraud (Y)	Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa	1. Pengendalian 2. Pengawasan 3. Kepatuhan 4. Pencegahan kecurangan	1. Terdapat pengawasan dalam pengadaan 2. Pegawai mematuhi aturan 3. Sistem mencegah tindakan curang 4. Terdapat sanksi tegas terhadap pelanggaran	Likert

Sumber: Peneliti, 2026

Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan menggunakan SPSS. Kualitas instrumen diuji melalui korelasi *Pearson item-total* dan *Cronbach's alpha*. Dengan $n = 25$, $df = 23$, dan $\alpha = 5\%$ (dua arah), r -tabel adalah 0,396. Reliabilitas diinterpretasikan dengan memperhatikan besarnya α dan jumlah item; nilai α 0,635 pada konstruk tiga-item diperlakukan sebagai reliabilitas marginal yang perlu dibaca secara hati-hati. Uji asumsi klasik mencakup normalitas residual (*Shapiro-Wilk*), multikolinearitas (*Tolerance* dan *VIF*), serta heteroskedastisitas melalui regresi residual absolut (uji Glejser). Hipotesis diuji dengan regresi linier berganda, uji t , uji F , serta R^2 dan *Adjusted R²* pada taraf signifikansi 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics							
	N	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation	Variance
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Statistic
TOTAL_KO	25	9.00	15.00	13.5600	.30594	1.52971	2.340
TOTAL_SPI	25	18.00	25.00	21.6400	.47216	2.36079	5.573
TOTAL_EP	25	14.00	20.00	18.0000	.39581	1.97906	3.917
TOTAL_FD	25	16.00	20.00	17.8400	.34000	1.70000	2.890
Valid N (listwise)	25						

Sumber: SPSS, 2026

Secara keseluruhan, hasil pengujian menunjukkan bahwa keempat variabel penelitian tersebut memiliki nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-ratanya (*Standard Deviation* < *Mean*). Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebaran data pada variabel TOTAL_KO, TOTAL_SPI, TOTAL_EP, dan TOTAL_FD bersifat homogen atau memiliki tingkat variasi yang rendah antar-responden. Dengan tingkat penyimpangan data yang relatif kecil dan berpusat di sekitar nilai rata-rata, maka data dalam penelitian ini dapat dinyatakan representatif dan layak untuk digunakan pada analisis statistik tahap selanjutnya.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Komitmen Organisasi (X1)

Variables	Statistics	Variables			
		KO_1	KO_2	KO_3	TOTAL_KO
KO_1	Pearson Correlation	1	.458*	.620**	.836**
	Sig. (2-tailed)		.021	<.001	<.001
	N	25	25	25	25
KO_2	Pearson Correlation	.458*	1	.273	.587**
	Sig. (2-tailed)	.021		.186	.002
	N	25	25	25	25
KO_3	Pearson Correlation	.620**	.273	1	.906**
	Sig. (2-tailed)	<.001	.186		<.001
	N	25	25	25	25
TOTAL_KO	Pearson Correlation	.836**	.587**	.906**	1
	Sig. (2-tailed)	<.001	.002	<.001	
	N	25	25	25	25

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: SPSS, 2026

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Pengendalian Internal (X2)

		Correlations					
		SPI_1	SPI_2	SPI_3	SPI_4	SPI_5	TOTAL_SPI
SPI_1	Pearson Correlation	1	.716**	.582**	.421*	.589**	.815**
	Sig. (2-tailed)		<.001	.002	.036	.002	<.001
	N	25	25	25	25	25	25
SPI_2	Pearson Correlation	.716**	1	.488*	.596**	.561**	.816**
	Sig. (2-tailed)	<.001		.013	.002	.004	<.001
	N	25	25	25	25	25	25
SPI_3	Pearson Correlation	.582**	.488*	1	.661**	.751**	.842**
	Sig. (2-tailed)	.002	.013		<.001	<.001	<.001
	N	25	25	25	25	25	25
SPI_4	Pearson Correlation	.421*	.596**	.661**	1	.573**	.786**
	Sig. (2-tailed)	.036	.002	<.001		.003	<.001
	N	25	25	25	25	25	25
SPI_5	Pearson Correlation	.589**	.561**	.751**	.573**	1	.849**
	Sig. (2-tailed)	.002	.004	<.001	.003		<.001
	N	25	25	25	25	25	25
TOTAL_SPI	Pearson Correlation	.815**	.816**	.842**	.786**	.849**	1
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	
	N	25	25	25	25	25	25

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber: SPSS, 2026

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Variabel Implementasi *E-Procurement* (X3)

		Correlations				
		IEP_1	IEP_2	IEP_3	IEP_4	TOTAL_EP
IEP_1	Pearson Correlation	1	.766**	.740**	.644**	.898**
	Sig. (2-tailed)		<.001	<.001	<.001	<.001
	N	25	25	25	25	25
IEP_2	Pearson Correlation	.766**	1	.629**	.755**	.903**
	Sig. (2-tailed)	<.001		<.001	<.001	<.001
	N	25	25	25	25	25
IEP_3	Pearson Correlation	.740**	.629**	1	.629**	.842**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001		<.001	<.001
	N	25	25	25	25	25
IEP_4	Pearson Correlation	.644**	.755**	.629**	1	.867**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001		<.001
	N	25	25	25	25	25
TOTAL_EP	Pearson Correlation	.898**	.903**	.842**	.867**	1
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	
	N	25	25	25	25	25

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: SPSS, 2026

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Variabel Pencegahan *Fraud* (Y)

		Correlations				
		PF_1	PF_2	PF_3	PF_4	TOTAL_FD
PF_1	Pearson Correlation	1	.603**	.679**	.529**	.861**
	Sig. (2-tailed)		.001	<.001	.007	<.001
	N	25	25	25	25	25
PF_2	Pearson Correlation	.603**	1	.442*	.333	.725**
	Sig. (2-tailed)	.001		.027	.103	<.001
	N	25	25	25	25	25
PF_3	Pearson Correlation	.679**	.442*	1	.673**	.861**
	Sig. (2-tailed)	<.001	.027		<.001	<.001
	N	25	25	25	25	25
PF_4	Pearson Correlation	.529**	.333	.673**	1	.795**
	Sig. (2-tailed)	.007	.103	<.001		<.001
	N	25	25	25	25	25
TOTAL_FD	Pearson Correlation	.861**	.725**	.861**	.795**	1
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	
	N	25	25	25	25	25

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber: SPSS, 2026

Berdasarkan hasil uji validitas seluruh variabel penelitian, diketahui bahwa semua item pernyataan memiliki nilai *r hitung* lebih besar dari *r tabel* (0,396) dan nilai signifikansi kurang dari 0,05, sehingga seluruh item pernyataan dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas**Tabel 8. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Komitmen Organisasi (X1)****Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.635	3

Sumber: SPSS, 2026

Tabel 9. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sistem Pengendalian Internal (X2)**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.876	5

Sumber: SPSS, 2026

Tabel 10. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Implementasi *E-Procurement* (X3)**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.900	4

Sumber: SPSS, 2026

Tabel 11. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pencegahan *Fraud* (Y)**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.824	4

Sumber: SPSS, 2026

Tiga variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* di atas 0,80, sedangkan komitmen organisasi memiliki alpha 0,635. Nilai terakhir masih menunjukkan konsistensi internal moderat untuk skala singkat, tetapi menjadi salah satu keterbatasan pengukuran yang perlu diperhatikan.

Uji Asumsi Klasik**Uji Normalitas****Tabel 12. Hasil Uji Normalitas****Tests of Normality**

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Standardized Residual	.158	25	.110	.959	25	.404

a. Lilliefors Significance Correction

Sumber: SPSS, 2026

Berdasarkan hasil output SPSS pada tabel *Tests of Normality*, nilai signifikansi (*Sig.*) pada kolom *Shapiro-Wilk* untuk nilai *Standardized Residual* adalah sebesar 0,404. Nilai

tersebut lebih besar dari 0,05 ($0,404 > 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai residual dalam model regresi penelitian ini berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas dalam uji asumsi klasik telah terpenuhi.

Uji Multikolinearitas

Tabel 13. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model	Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error					Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.151	2.008		1.071	.296		
	TOTAL_KO	.143	.123	.129	1.165	.257	.837	1.195
	TOTAL_SPI	.550	.089	.763	6.182	<.001	.671	1.490
	TOTAL_EP	.103	.111	.120	.925	.366	.611	1.636

a. Dependent Variable: TOTAL_FD

Sumber: SPSS, 2026

Variabel Komitmen Organisasi (Total_KO) memiliki nilai *Tolerance* sebesar $0,837 > 0,10$ dan nilai *VIF* sebesar $1,195 < 10,00$. Variabel Sistem Pengendalian Internal (Total_SPI) memiliki nilai *Tolerance* sebesar $0,671 > 0,10$ dan nilai *VIF* sebesar $1,490 < 10,00$. Variabel *E-Procurement* (Total_EP) memiliki nilai *Tolerance* sebesar $0,611 > 0,10$ dan nilai *VIF* sebesar $1,636 < 10,00$. Berdasarkan hasil analisis tersebut, seluruh variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai *Tolerance* yang lebih besar dari 0,10 dan nilai *VIF* yang lebih kecil dari 10,00. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari gejala multikolinearitas, sehingga memenuhi syarat asumsi klasik untuk analisis regresi linier berganda.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 14. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a								
Model	Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error					Tolerance	VIF
1	(Constant)	.854	1.317		.649	.523		
	TOTAL_KO	.070	.081	.202	.873	.393	.837	1.195
	TOTAL_SPI	-.002	.058	-.009	-.036	.972	.671	1.490
	TOTAL_EP	-.066	.073	-.246	-.911	.373	.611	1.636

a. Dependent Variable: ABS_Res

Sumber: SPSS, 2026

Berdasarkan uji heteroskedastisitas menggunakan metode uji pada tabel *coefficient*, diketahui bahwa nilai signifikansi (Sig.) untuk variabel Komitmen Organisasi (Total_KO) adalah sebesar 0,393 Sistem Pengendalian Internal (Total SPI) sebesar 0,972 dan Implementasi *E-Procurement* (Total_EP) sebesar 0,373. Karena seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi yang tetap yaitu 0,05 ($\text{Sig.} > 0,05$), maka dapat disimpulkan model regresi dalam penelitian ini terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian, model ini layak digunakan dalam memprediksi Pencegahan *Fraud* (Total_FD).

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 15. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a								
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.151	2.008		1.071	.296		
	TOTAL_KO	.143	.123	.129	1.165	.257	.837	1.195
	TOTAL_SPI	.550	.089	.763	6.182	<.001	.671	1.490
	TOTAL_EP	.103	.111	.120	.925	.366	.611	1.636

a. Dependent Variable: TOTAL_FD

Sumber: SPSS, 2026

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda pada tabel *coefficients*, diperoleh nilai konstanta sebesar 2,151. Nilai koefisien regresi variabel Komitmen Organisasi (Total_KO) sebesar 0,143, variabel Sistem Pengendalian Internal (Total_SPI) sebesar 0,550, dan variabel *E-Procurement* (Total_EP) sebesar 0,103. Dengan demikian, persamaan regresi yang diperoleh adalah

$$Y = 2,151 + 0,143 X_1 + 0,550 X_2 + 0,103 X_3$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa setiap peningkatan pada variabel independen akan meningkatkan nilai variabel dependen, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

Uji Hipotesis

Uji T (Parsial)

Tabel 16. Hasil Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	2.151	2.008		1.071	.296		
TOTAL_KO	.143	.123	.129	1.165	.257	.837	1.195
TOTAL_SPI	.550	.089	.763	6.182	<.001	.671	1.490
TOTAL_EP	.103	.111	.120	.925	.366	.611	1.636

a. Dependent Variable: TOTAL_FD

Sumber: SPSS, 2026

Berdasarkan hasil uji T (parsial) pada tabel *coefficients*, diketahui bahwa variabel Komitmen Organisasi (Total_KO) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,257 > 0,05 sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan *Fraud*. Hasil tidak mendukung H1, temuan ini menunjukkan bahwa keterikatan pegawai pada organisasi belum cukup, secara statistik, untuk menjelaskan variasi pencegahan *fraud* ketika pengendalian internal dan *e-procurement* dianalisis secara bersamaan. Hasil ini berbeda dari Leatemia dan Febryanti (2020), tetapi sejalan dengan Wibowo dan Hardaningsih (2023) serta pola inkonsistensi yang terlihat pada Syalwa et al. (2023). Secara substantif, pencegahan *fraud* pada proses pengadaan yang sangat terstandarisasi mungkin lebih banyak ditentukan oleh mekanisme formal yang membatasi kesempatan daripada oleh sikap keterikatan pegawai saja. Selain itu, variasi jawaban komitmen yang relatif sempit dan reliabilitas skala yang marginal ($\alpha = 0,635$) dapat mengurangi kemampuan model mendeteksi efek yang lebih kecil. Karena itu, hasil ini tidak berarti komitmen tidak penting, tetapi menunjukkan bahwa komitmen perlu diterjemahkan ke dalam kepatuhan, integritas, dan mekanisme akuntabilitas yang dapat diamati.

Variabel Sistem Pengendalian Internal (Total_SPI) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 < 0,05 sehingga berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan *Fraud*. H2 didukung

dengan koefisien paling kuat dalam model, Temuan ini konsisten dengan *Fraud Triangle* karena pengendalian internal secara langsung mengurangi *opportunity* melalui otorisasi, segregasi tugas, penilaian risiko, dokumentasi, verifikasi, dan monitoring. Hasil juga sejalan dengan Yuniarti (2017), Akbar et al. (2019), Taufik (2019), Wardani et al. (2021), Dewi dan Sari (2022), serta Supriyanto (2022). Pada konteks BPBD, pengendalian internal menjadi penting karena kecepatan pemenuhan kebutuhan harus tetap disertai bukti transaksi, review, dan pembagian kewenangan yang jelas. Dengan demikian, kontribusi utama temuan bukan sekadar bahwa SPI 'signifikan', melainkan bahwa mekanisme pengendalian formal tampak lebih menentukan dibandingkan faktor sikap dan keberadaan teknologi semata.

Sementara itu, variabel *E-Procurement* (Total_EP) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,366 > 0,05$ sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan *Fraud*. H3 tidak didukung, hasil ini tidak seharusnya ditafsirkan bahwa *e-procurement* tidak bermanfaat. *E-procurement* dapat menjadi infrastruktur transparansi yang manfaat *anti-fraud*-nya baru muncul ketika sistem digunakan secara substantif, terintegrasi dengan pengawasan, dan didukung kompetensi serta *governance* yang baik. Argumen ini sejalan dengan Sa'adah (2020) dan Jiménez et al. (2022), serta temuan Safitri et al. (2024) bahwa pengaruh *e-procurement* dapat berbeda antar-tahapan. Di sisi lain, Wardani et al. (2021), Dewi dan Sari (2022), Khairunnah dan Nadirsyah (2022), dan Rahayu et al. (2021) menemukan pengaruh positif pada konteks lain. Perbedaan ini mendukung pandangan bahwa digitalisasi bukan substitusi bagi pengendalian internal; sistem elektronik menyediakan *audit trail* dan keterlacakan, tetapi efektivitas pencegahannya tetap bergantung pada bagaimana *exception*, *red flags*, evaluasi penyedia, dan tindak lanjut pengawasan dikelola.

Uji F (Simultan)

Tabel 17. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	54.448	3	18.149	25.558	<.001 ^b
	Residual	14.912	21	.710		
	Total	69.360	24			

a. Dependent Variable: TOTAL_FD

b. Predictors: (Constant), TOTAL_EP, TOTAL_KO, TOTAL_SPI

Sumber: SPSS, 2026

Berdasarkan hasil uji *F* (simultan) pada tabel ANOVA, diperoleh nilai *F* sebesar 25.558 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Internal, dan *E-Procurement* secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan *Fraud*. Dengan demikian, model regresi ini dinyatakan layak (*goodness of fit*) untuk digunakan dalam memprediksi nilai Pencegahan *Fraud*.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 18. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.886 ^a	.785	.754	.84268

a. Predictors: (Constant), TOTAL_EP, TOTAL_KO, TOTAL_SPI

b. Dependent Variable: TOTAL_FD

Sumber: SPSS, 2026

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel *Model Summary*, diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,754. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Internal, dan *E-Procurement* mampu menjelaskan variabel Pencegahan *Fraud* sebesar 75,4%, sedangkan sisanya sebesar 24,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Model secara keseluruhan signifikan dan memiliki *Adjusted R²* 0,754, tetapi signifikansi simultan tidak berarti setiap prediktor berpengaruh secara individual. Temuan justru memperlihatkan struktur kontribusi yang tidak seimbang: SPI menjadi penjelas utama, sedangkan komitmen organisasi dan *e-procurement* tidak signifikan setelah dikontrol bersama. Secara teoritis, hasil ini memperkuat fokus *Fraud Triangle* pada *opportunity* dalam konteks pengadaan publik. Secara praktis, BPBD sebaiknya tidak berhenti pada keberadaan *platform* elektronik atau program pembentukan komitmen, tetapi memastikan pengendalian berbasis risiko, segregasi tugas, review berjenjang, *monitoring* transaksi, *audit trail*, dan tindak lanjut atas anomali berjalan secara konsisten. Pendekatan ini selaras dengan arah penguatan transparansi dan *e-audit* pada Katalog Elektronik V6 yang dikembangkan LKPP (2025).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada pengadaan barang dan jasa BPBD Provinsi Jawa Barat, sedangkan komitmen organisasi dan implementasi *e-procurement* tidak berpengaruh signifikan secara parsial. Model secara keseluruhan signifikan dan menjelaskan 75,4% variasi pencegahan *fraud* berdasarkan *Adjusted R²*. Temuan tersebut menunjukkan bahwa dalam konteks penelitian ini, mekanisme pengendalian formal yang membatasi kesempatan *fraud* lebih kuat daripada faktor sikap organisasi maupun keberadaan sistem digital secara mandiri.

Implikasi Praktis dan Saran Penelitian Selanjutnya

BPBD Provinsi Jawa Barat perlu memprioritaskan penguatan pengendalian berbasis risiko, terutama pada segregasi tugas, otorisasi, dokumentasi, review penyedia, monitoring transaksi, dan tindak lanjut atas red flags. E-procurement perlu dimanfaatkan bukan hanya sebagai kanal transaksi, tetapi sebagai sumber audit trail dan data pengawasan; sementara program penguatan komitmen sebaiknya dikaitkan dengan indikator perilaku yang konkret seperti kepatuhan, integritas, dan pelaporan penyimpangan. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas sampel ke beberapa BPBD atau organisasi perangkat daerah, menggunakan instrumen dengan reliabilitas lebih kuat, serta mempertimbangkan variabel seperti integritas, *whistleblowing system*, budaya etis, kompetensi pengadaan, kualitas audit internal, dan kematangan pemanfaatan *e-procurement*. *Mixed methods* juga dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa sistem digital tidak selalu menghasilkan efek *anti-fraud* secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. G., Rosidi, & Andayani, W. (2019). Pengaruh Implementasi E-Procurement dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa Dengan Budaya Etis Organisasi Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Economia*, 15(1), 69-81.
- Artantri, L. P. R. M., Handajani, L., & Pituringsih, E. (2016). Peran E-Procurement Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah di Pulau Lombok. *NeO~Bis*, 10(1), 16-32.
- Association of Certified Fraud Examiners. (2022). *Report to the Nations: Global Study on Occupational Fraud and Abuse*. ACFE.
- Association of Certified Fraud Examiners. (2024). *Occupational Fraud 2024: A Report to the Nations*. ACFE.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2013). *Internal Control-Integrated Framework*. COSO.
- Cressey, D. R. (1953). *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement*. Free Press.
- Dewi, C. A. P., & Sari, R. P. (2022). Implementasi Sistem E-Procurement dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Jombang. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 6(1), 200-213. <https://doi.org/10.31539/costing.v6i1.4608>
- Indonesia Corruption Watch. (2024). *Penguatan auditor: Pengawasan berbasis data di Indonesia untuk mencegah potensi korupsi pada sektor pengadaan publik*. ICW.
- Jiménez, A., Hanoteau, J., & Barkemeyer, R. (2022). E-procurement and firm corruption to secure public contracts: The moderating role of governance institutions and supranational support. *Journal of Business Research*, 149, 640-650. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.05.070>
- Khairunnah, I., & Nadirsyah. (2022). Pengaruh Penerapan E-Procurement dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 7(4), 578-594. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v7i4.21014>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2025). *Pengadaan barang dan jasa, sektor paling rentan korupsi di temuan SPI 2024*. Jakarta: KPK.
- Leatemia, S. Y., & Febryanti, N. F. (2020). Pengaruh pengendalian internal dan komitmen organisasi terhadap pencegahan fraud pengadaan barang: Studi empiris pada rumah sakit pemerintah di Kota Ambon. *ARIKA*, 14(1), 15-22. <https://doi.org/10.30598/arika.2020.14.1.15>
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2024). LKPP dorong cetak lebih banyak ahli pengadaan yang berintegritas.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2025). Era baru pengadaan barang/jasa pemerintah dengan Katalog Elektronik V6.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Rahayu, N. K. D., Endiana, I. D. M., & Arizona, I. P. E. (2021). Peran E-Procurement Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pengadaan Barang/Jasa Dengan Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi Sebagai Pemoderasi. *Jurnal KARMA*, 1(6), 1864-1871.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2015). *Organizational Behavior (16th ed.)*. Pearson.

- Sa'adah, N. (2020). The implementation of e-procurement in Indonesia: Benefits, risks, and problems. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 14(2), 283-304. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v14i2.283-304>
- Safitri, R. H., Kalsum, U., Usmayanti, V., & Arief, R. H. S. (2024). Pengaruh E-Procurement Terhadap Pencegahan Fraud di Pemerintah Daerah Sumatera Selatan. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 8(3), 2580-2590. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2092>
- Salim, M., Syarifuddin, & Syamsuddin. (2016). Efek Moderasi Komitmen Organisasi Pada Pengaruh Implementasi E-Procurement Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Analisis*, 5(2), 178-185.
- Septiawan, B. (2018). Keberhasilan Implementasi Sistem E-Procurement Pada Pemerintah Daerah Se-Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 2(1), 23-40. <https://doi.org/10.33603/jka.v2i1.1240>
- Supriyanto, D. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Fraud Pada Pengadaan Barang dan Jasa: Sistem Pengendalian Internal, E-Procurement, Sistem dan Prosedur. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(2), 131-141.
- Syalwa, M., Maria, M., & Kadarwati, S. (2023). Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas PUPR Kota Palembang. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 7(1), 1-8.
- Taufik. (2019). The Effect of Internal Control System Implementation In Realizing Good Governance and Its Impact on Fraud Prevention. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 8(9), 2159-2165.
- Wardani, D. K., Primastiwi, A., & Hanisah. (2021). Fraud prevention of government procurement of goods and services in local government. *Jurnal Akuntansi*, 25(2), 256-275. <https://doi.org/10.24912/ja.v25i2.809>
- Wardhani, I. I., A. Pratami, & I. Pratama. (2021). E-Procurement sebagai Upaya Pencegahan Fraud terhadap Pengadaan Barang dan Jasa di Unit Layanan Pengadaan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 7(2):126-139. <https://doi.org/10.31289/jab.v7i2.5293>
- Wibowo, K. M., & Hardaningsih, P. (2023). Can Internal Characteristics Prevent Fraud In Procurement of Goods and Services? *Journal of Accounting and Business Education*, 7(2). <https://doi.org/10.26675/jabe.v7i2.26771>
- Yuniarti, R. D. (2017). The Effect Of Internal Control and Anti-Fraud Awareness on Fraud Prevention: A Survey On Inter-Governmental Organizations. *Journal of Economics, Business & Accountancy Ventura*, 20(1), 113-124. <https://doi.org/10.14414/jebav.v20i1.751>
- Yusni, Y. (2022). Pengaruh Implementasi E-Procurement dan Komitmen Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa Dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi. *INOBI: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia*, 5(2), 138-148.

Ethics declarations

Responsible use of AI

The authors declare that any artificial intelligence (AI) tools used in the preparation of this manuscript were used in accordance with ethical research standards, and that the authors retain full responsibility for the final content.

Competing interests

The authors declare that they have no known competing financial interests or personal relationships that could have influenced the work reported in this paper.